

# SEMAKIN RELIGIUS, SEMAKIN INTOLERAN? PERAN KEPERCAYAAN POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERATOR

Agung Minto Wahyu<sup>1</sup>, Mochammad Sa'id<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Psikologi, Universitas Negeri Malang  
Malang, Indonesia

e-mail: agungminto98@gmail.com, mohammad.sa'id.fpsi@um.ac.id

## Abstrak

Survei Wahid Foundation dan LSI (2017) menunjukkan adanya penguatan terhadap intoleransi politik. Satu faktor yang memperkuat intoleransi politik adalah religiusitas. Tujuan penelitian ini adalah 1) memaparkan pengaruh religiusitas sebagai prediktor terhadap intoleransi politik. 2) memaparkan efek kepercayaan politik dalam memoderasi variabel religiusitas sebagai prediktor intoleransi politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif. Subjek penelitian sebanyak 85 Mahasiswa. *Sampling* menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria subjek beragama islam, berstatus mahasiswa aktif, dan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Instrumen penelitian menggunakan skala likert. Data dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara religiusitas terhadap intoleransi politik ( $t$  hitung = -2,490 ;  $p < 0,05$  ; R-Square = 0,070). Sedangkan kepercayaan politik sebagai variabel moderator berhasil memperkuat pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik (R-Square = 0,144). Kesimpulannya bahwa keseluruhan uji hipotesis terbukti sehingga H1a dan H1b diterima.

**Kata kunci** : intoleransi politik, religiusitas, kepercayaan politik, toleransi, pluralisme

## Abstract

The Wahid Foundation and LSI surveys (2017) show a strengthening of political intolerance. One factor that strengthens political intolerance is religiosity. The aims of this study is 1) to explain the influence of religiosity as a predictor of political intolerance. 2) explained the effect of political trust in moderating the variable of religiosity as a predictor of political intolerance. The research method uses a descriptive quantitative approach. Research subjects were 85 students. Sampling uses a purposive sampling technique with the criteria of Islamic subjects, active student status, and affiliation with Nahdlatul Ulama (NU). The research instrument uses a Likert scale. Data were analyzed using simple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that there was a significant negative effect between religiosity on political intolerance ( $t$  count = -2.490;  $p < 0.05$ ; R-Square = 0.070). While political trust as a moderator variable succeeded in strengthening the influence of religiosity on political intolerance (R-Square = 0.144). The conclusion is that the whole hypothesis test is proven so that H1a and H1b are accepted.

**Keywords** : political intolerance, religiosity, political beliefs, tolerance, pluralism

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Apabila diukur dari jumlah penduduknya, Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Jika dalam kawasan Asia Tenggara, tentu Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbesar (Tempo.com, 2019).

Salah satu manifestasi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia yaitu dengan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) diberbagai tingkatan, mulai dari pemilihan kepala desa, bupati/walikota, gubernur, hingga presiden. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu tersebut, akan terjadi berbagai dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Salah satu dinamika yang mewarnai pemilu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat telah terjadi pelanggaran sebanyak 7.132, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden tahun 2019 (CNN Indonesia, 2019).

Bentuk implikasi dari banyaknya pelanggaran dalam pemilu tersebut yaitu berdasarkan data The Economist Intelligence (EIU), peringkat Indeks Demokrasi Republik Indonesia menurun cukup drastis dari semula 48 di tahun 2016, menjadi 68 di tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena salah satu indikator penilaiannya adalah kualitas dari proses pemilihan umum dan pluralisme di Indonesia, dimana dalam proses pemilihan umum banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab tersebut.

Selain pelanggaran yang terjadi tersebut, intoleransi politik juga menjadi masalah besar bagi Indonesia setiap kali proses pemilu dilaksanakan. Intoleransi politik terjadi apabila terdapat sikap menentang kebebasan sipil dalam kegiatan politik. Intoleransi politik diartikan sebagai keengganan untuk memberikan hak-hak sipil pada kelompok yang tidak disukai (Sullivan, Piereson, & Marcus, 1979). Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (dalam Ramadhan & Masykuri, 2018) menyatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap perbedaan pilihan politik sangat intoleran. Masyarakat cenderung menggunakan faktor-faktor agama untuk menentukan pilihan politiknya. Lebih lanjut, 57,88 persen responden mengatakan bahwa hanya akan memilih pemimpin seagama, baik

dari level pemilihan RT sampai pemilihan presiden.

Menurut Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (2019), terdapat empat faktor yang memperkuat terjadinya intoleransi politik di Indonesia, yaitu religiusitas, media sosial, fanatisme, dan sekularisme. Religiusitas menjadi faktor yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Penelitian LIPI ini mengungkapkan bahwa religiusitas akan menimbulkan fanatisme keagamaan yang tinggi sehingga menyebabkan tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemeluk agama lain. Hal tersebut menjadi pendorong munculnya intoleransi politik dalam masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) (dalam DetikNews, 2018), mengatakan bahwa terdapat 59,9% responden memiliki kelompok-kelompok tertentu yang dibenci, khususnya kelompok non-muslim, tionghoa, dan komunis. Bahkan 92,2% responden tidak setuju apabila kelompok yang dibenci tersebut menduduki pos pemerintahan di Indonesia.

Temuan Gibson (2010) juga menunjukkan bahwa peningkatan intoleransi politik memiliki keterkaitan dengan religiusitas. Orang yang religius memiliki potensi untuk lebih intoleran bukan karena merasa takut terancam oleh lawan politiknya, akan tetapi intoleransi politik pada kelompok religius terjadi karena disebabkan oleh semakin besarnya keterlibatan seseorang dalam agamanya (Gibson, 2010). Sejalan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Zhafira (2017) menyatakan bahwa religiusitas islam berkorelasi positif dengan intoleransi politik. Korelasi positif tersebut akan semakin diperkuat ketika terdapat variabel kepercayaan politik sebagai pemoderasi. Hasil penelitian berbeda dihasilkan oleh Saliyo (2018), dimana hasilnya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara religiusitas seseorang terhadap perilaku toleransi beragama seseorang.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Eisenstein & Clark (2014) menunjukkan bahwa kepercayaan politik seseorang memiliki hubungan yang searah dengan toleransi. Kepercayaan dapat menjadi variabel yang memoderasi pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik. Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan konteks toleransi dalam proses politik, seseorang yang memiliki kepercayaan tinggi akan cenderung lebih toleran. Dalam hal ini, kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan terhadap

pemerintahan maupun institusi politik (Newton, 2001).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik?, 2) bagaimana pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik dengan kepercayaan politik sebagai variabel pemoderasi?. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) menguraikan kemampuan variabel religiusitas dalam memengaruhi variabel intoleransi politik, 2) menjelaskan kemampuan variabel kepercayaan politik sebagai pemoderasi antara pengaruh variabel religiusitas terhadap variabel intoleransi politik.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang pertama sebagai variabel terikat adalah intoleransi politik. Sullivan, *et al.* (1981) mendefinisikan intoleransi politik sebagai ketidakmauan individu untuk mengizinkan ide dan gagasan dari kelompok yang tidak disukainya dapat berpartisipasi dalam aktivitas politik. Dalam hal ini, aktivitas politik yang dimaksudkan adalah dimulai dari hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Intoleransi politik akan dapat dideteksi ketika terdapat kelompok yang menolak ide atau pemikiran kelompok lain yang berlawanan dengan keyakinan kelompoknya (Gibson & Bingham, 1982).

Belum ada kejelasan mengenai batasan aktivitas politik yang dapat ditoleransi. Penelitian Morris & Stouffer (1955) menyatakan bahwa untuk mengukur intoleransi politik tidak hanya berfokus pada hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul di ruang publik, tetapi juga hak untuk melakukan keikutsertaan pada afiliasi tertentu. Penelitian-penelitian selanjutnya mengenai intoleransi politik memperluas makna aktivitas politik yaitu meliputi hak untuk dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk berbicara, hak untuk demonstrasi, hak untuk berkumpul secara legal, mengajar di sekolah negeri, bebas dari penyadapan, dan bersosialisasi dengan orang lain (Sullivan *et al.*, 1979).

Sullivan *et al.* (1981) mengemukakan aspek-aspek yang dapat memprediksi intoleransi politik, yaitu 1) determinan sosial, meliputi usia, status sosial, tingkat pendidikan, dan keberagamaan. 2) determinan psikologis, meliputi variabel-variabel kepribadian seperti *self-esteem*, aktualisasi nilai, dogmatisme agama, serta kepercayaan pada orang lain. 3) determinan politik, mencakup konservatisme, norma-norma umum, dan persepsi terhadap ancaman.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang kedua sebagai variabel bebas adalah religiusitas. El-Menouar (2014) mendefinisikan religiusitas Islam sebagai keimanan atau kepercayaan seorang penganut Agama Islam terhadap lima rukun Islam dan rukun iman serta perilaku dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dalam penelitian ini, religiusitas Islam diartikan sebagai keyakinan terhadap ajaran Islam dan perilaku seorang muslim dalam beragama.

El-Menouar (2014) membagi aspek-aspek dalam religiusitas Islam menjadi enam aspek, yaitu 1) kepercayaan (*Belief*), kepercayaan agama dalam Islam adalah keyakinan mengenai keberadaan Allah, dan kepercayaan pada Al-Quran sebagai wahyu Allah (Ruthven, dalam El-Menouar, 2014). Selain itu, kepercayaan ini juga diukur dengan sejauh mana tingkat kepercayaannya terhadap keberadaan jin, malaikat, dan makhluk lain yang ditemukan dalam Al-Quran. 2) ritual, ritual keagamaan telah dijelaskan oleh lima rukun Islam. Kelima pilar itu mengandung lebih dari sekadar ritual keagamaan. Selain itu, aspek ini juga memuat pernyataan keyakinan terhadap sumbangan agama (zakat). Selain itu, untuk mengukur dimensi ritualistik, dilakukan juga dengan menggunakan frekuensi dalam melakukan ritual salat, pergi haji atau umroh, puasa selama bulan suci Ramadhan, dan merayakan akhir puasa selama Ramadhan (Waardenburg, dalam El-Menouar, 2014). 3) ketaatan (*devotion*), digunakan untuk mengukur praktik pengamalan agama, dilakukan dengan menggunakan frekuensi berdoa secara pribadi kepada Allah dan frekuensi membaca basmala. (Khoury *et al.*, dalam El-Menouar, 2014). 4) pengalaman (*experience*), aspek komunikasi yang dirasakan dengan agensi supernatural adalah karakteristik pengalaman keagamaan. Hal-hal atau kejadian luar biasa dianggap sebagai tanda-tanda dari luar. Insiden buruk atau baik sering dianggap berasal dari Allah, yang diyakini memberi hadiah atau menghukum perilaku manusia di dunia ini (Robbins, Glock, & Stark, 1966). 5) pengetahuan (*knowledge*), isi Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama pengetahuan Islam dan diharapkan bahwa orang-orang beriman minimal mengetahui isi dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut (Waardenburg, dalam El-Menouar, 2014). 6) konsekuensi (*consequences*), hukum agama tidak hanya memberikan panduan untuk melakukan ritual keagamaan yang benar, tetapi juga mengatur kehidupan sehari-hari orang tersebut. Ketaatan terhadap norma-

norma itu tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai konsekuensi dari religiusitas bahkan ketika norma-norma tersebut berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

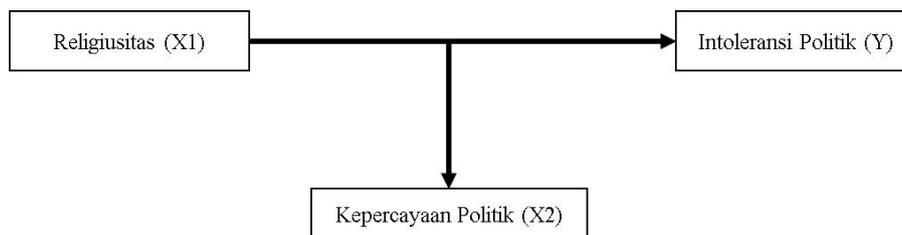
Penelitian ini menggunakan landasan teori yang pertama sebagai variabel moderator adalah kepercayaan politik. Elemen penting yang dibutuhkan di dalam negara demokrasi adalah kepercayaan yang lebih tinggi terhadap masyarakat maupun lembaga pemerintahan yang terlibat dalam aktivitas sosial maupun politik. mendefinisikan kepercayaan politik sebagai keyakinan bahwa pemangku jabatan pemerintahan memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas sosial dan berkinerja optimal dalam menjalankan perannya. Definisi lain disampaikan oleh (Newton, 2001) yang menyatakan bahwa kepercayaan politik sebagai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan instansi politik. Lebih lanjut, kepercayaan politik diartikan sebagai keyakinan seseorang bahwa pejabat pemerintahan tidak memiliki niatan untuk melakukan perilaku yang merugikan rakyat (Newton, 2001).

Tinggi rendahnya kepercayaan politik dari masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dari eksternal, diantaranya yaitu stabilitas ekonomi, reputasi pejabat pemerintahan, dan konflik sosial (Newton, 2001). Selain itu, kepercayaan politik juga berkaitan dengan variabel politik seperti

kepercayaan terhadap pemerintah, minat terhadap dunia politik, serta kebanggaan terhadap negara. Oleh karena itu, kepercayaan adalah salah satu komponen yang utama dalam menjaga stabilitas dari sebuah demokrasi (Hardin, 2003). Kepercayaan politik juga dapat menunjukkan penilaian individu sebagai warga di wilayah tertentu (negara maupun kota). Oleh karena itu, kepercayaan politik dapat didefinisikan sebagai keyakinan rakyat terhadap kinerja pejabat publik maupun institusi pemerintahan (Newton, 2001).

Grimmelikhuijsen dan Knies, (2017) membagi kepercayaan politik ke dalam tiga aspek atau dimensi, yaitu 1) *perceived competence* merupakan persepsi rakyat terhadap kemampuan pemerintah atau pelayan publik untuk melaksanakan perannya secara efektif, terampil, dan profesional. 2) *perceived benevolence*, merupakan persepsi rakyat bahwa pemerintah atau pelayan publik peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan termotivasi untuk mengambil tindakan atau kebijakan atas kepentingan rakyat. 3) *perceived integrity*, merupakan persepsi rakyat bahwa pemerintah atau pelayan publik yang terpilih tulus, jujur, dan memenuhi janji-janji politiknya.

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan tersebut, berikut adalah kerangka konseptual dalam penelitian.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian pada gambar 1 tersebut, diperoleh hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

- H1a : Terdapat pengaruh yang signifikan antara religiusitas terhadap intoleransi politik
- H1b : Kepercayaan politik signifikan sebagai variabel moderator untuk memperkuat pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional untuk mengetahui

pengaruh antara variabel religiusitas (X1) terhadap variabel intoleransi politik (Y). serta mengetahui signifikansi dari variabel kepercayaan politik (X2) sebagai variabel pemoderasi antara pengaruh variabel religiusitas (X1) terhadap variabel intoleransi politik (Y). Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Islam Malang. Sedangkan pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *non-probability sampling* yang merupakan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2016). Teknik *non-*

*probability sampling* yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang terdapat dalam penelitian ini. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu subjek beragama islam, berstatus mahasiswa aktif, dan berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam hal ini, sampel yang digunakan dalam penelitian adalah berjumlah 85 responden.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari tiga skala, yaitu skala religiusitas, skala kepercayaan politik, dan skala intoleransi politik. Skala religiusitas diadaptasi dari *Muslim Religiosity Scale* yang telah dikembangkan oleh El-Menouar (2014), yang terdiri aspek kepercayaan (*belief*), ritual, ketaatan (*devotion*), pengalaman (*experience*), pengetahuan (*knowledge*), dan konsekuensi (*Consequences*). Skala tersebut telah diuji coba dan menghasilkan nilai validitas berkisar antara 0,366 hingga 0,753. Kemudian nilai reliabilitas *alpha cronbach* sebesar 0,865. Skala kepercayaan politik diadaptasi dari *Citizen Trust in Government Organizations (CTGO) Scale* yang telah dikembangkan oleh Grimmelikhuijsen dan Knies (2017), yang terdiri dari aspek *perceived competence*, *perceived benevolence*, dan *perceived integrity*. Skala tersebut telah diuji coba dan

menghasilkan nilai validitas berkisar antara 0,656 hingga 0,924. Kemudian nilai reliabilitas *alpha cronbach* sebesar 0,952. Skala intoleransi politik diadaptasi dari *Political Intolerance Scale* yang telah dikembangkan oleh Gibson & Bingham (1982), yang terdiri dari aspek situasional, behavioral, dan emosional. Skala tersebut telah diuji coba dan menghasilkan nilai validitas berkisar antara 0,339 hingga 0,669. Kemudian nilai reliabilitas *alpha cronbach* sebesar 0,736.

Data penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan instrumen yang sudah valid dan reliabel kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan dari IBM SPSS versi 25,0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk ke hasil analisis mengenai uji asumsi klasik dan hasil analisis mengenai uji hipotesis, berikut adalah pemaparan dari hasil uji analisis deskriptif dalam penelitian ini. Berikut adalah tabel hasil analisis deskriptif pada variabel religiusitas.

**Tabel 1.** Analisis Deskriptif Variabel Religiusitas

Var.	N	Min	Max	Mean	SD
X1	85	57	80	71,35	5,133

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

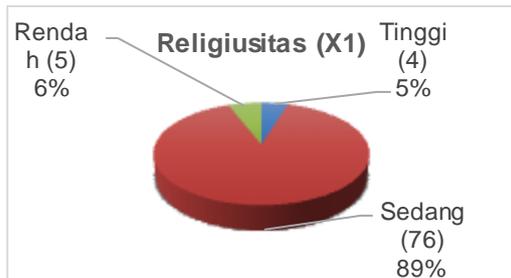
Menurut tabel 1, dapat dilihat bahwa dari 85 subjek pada variabel religiusitas (X1) memiliki skor tertinggi sebesar 80, skor terendah sebesar 57, skor *mean* sebesar 71,35, dan standar deviasi sebesar 5,133. Kategorisasi dari variabel religiusitas ini berdasarkan skor T adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.** Kategorisasi Skala Religiusitas (X1)

Variabel	Kategori	Skor
Religiusitas (X1)	Tinggi	>65
	Sedang	35,01 - 65
	Rendah	≤ 35

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Dari kategorisasi tersebut kemudian diperoleh hasil kategorisasi responden pada variabel religiusitas.



Gambar 2. Hasil Kategorisasi Variabel Religiusitas (X1)

Gambar 2 menunjukkan hasil kategorisasi variabel religiusitas menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dari keseluruhan responden, terdapat 4 responden yang mendapat skor tinggi atau sebesar 5 persen, 76 responden yang mendapat skor sedang atau sebesar 89 persen, dan sisanya 5 responden yang mendapat skor rendah atau sebesar 6 persen. Selanjutnya adalah tabel hasil analisis deskriptif pada variabel kepercayaan politik.

Tabel 3. Analisis Deskriptif Variabel Kepercayaan Politik

Var	N	Min	Max	Mean	SD
X2	85	40	64	54,66	6,164

Menurut tabel 9, dapat dilihat bahwa dari 85 subjek pada variabel kepercayaan politik (X2) memiliki skor tertinggi sebesar 64, skor terendah sebesar 40, skor *mean* sebesar

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)* 54,66, dan standar deviasi sebesar 6,164. Kategorisasi dari variabel kepercayaan politik ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Kategorisasi Skala Kepercayaan Politik (X2)

Variabel	Kategori	Skor
Kepercayaan Politik (X2)	Tinggi	>65
	Sedang	35,01 - 65
	Rendah	≤ 35

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Dari kategorisasi tersebut kemudian diperoleh hasil kategorisasi responden pada variabel kepercayaan politik.



Gambar 3. Hasil Kategorisasi Variabel Kepercayaan Politik (Y)

Gambar 3 menunjukkan hasil kategorisasi variabel kepercayaan politik menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dari keseluruhan responden, terdapat 11 responden yang mendapat skor tinggi atau sebesar 13 persen, 67 responden yang mendapat skor sedang atau sebesar 79 persen, dan sisanya 7 responden yang mendapat skor rendah atau sebesar 8 persen. Selanjutnya adalah tabel hasil analisis deskriptif pada variabel intoleransi politik.

Tabel 5. Analisis Deskriptif Variabel Intoleransi Politik

Var.	N	Min	Max	Mean	SD
Y	85	59	103	77,33	8,198

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Menurut tabel 9, dapat dilihat bahwa dari 85 subjek pada variabel intoleransi politik (Y) memiliki skor tertinggi sebesar 103, skor terendah sebesar 59, skor *mean* sebesar

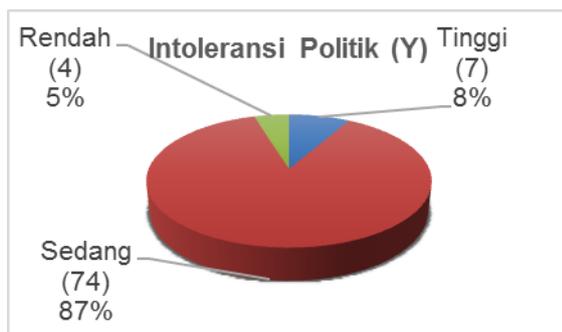
77,33, dan standar deviasi sebesar 8,198. Kategorisasi dari variabel kepercayaan politik ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.** Kategorisasi Skala Intoleransi Politik (Y)

Variabel	Kategori	Skor
Intoleransi Politik (Y)	Tinggi	>65
	Sedang	35,01 - 65
	Rendah	≤ 35

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Dari kategorisasi tersebut kemudian diperoleh hasil kategorisasi responden pada variabel intoleransi politik.



Gambar 4. Hasil Kategorisasi Variabel Intoleransi Politik (Y)

Gambar 2 menunjukkan hasil kategorisasi variabel intoleransi politik menjadi tiga kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dari keseluruhan responden, terdapat 7 responden yang mendapat skor tinggi atau sebesar 8 persen, 74 responden yang mendapat skor sedang atau sebesar 87 persen, dan sisanya 4 responden yang mendapat skor rendah atau sebesar 5 persen. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas.

**Tabel 7.** Hasil Uji Normalitas

	Variabel		
	(X1)	(X2)	(Y)
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,478	0,462	0,683

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Berdasarkan tabel hasil 16 uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) masing-masing variabel yaitu religiusitas (0,478), kepercayaan politik (0,462), dan intoleransi politik (0,683).

Nilai-nilai tersebut secara keseluruhan berada di atas 0,05 yang berarti bahwa seluruh variabel memiliki data yang berdistribusi normal. Selanjutnya adalah hasil uji linearitas yang terdapat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8.** Hasil Uji Linearitas Variabel Religiusitas

<i>Deviation from Linearity</i>	<b>Sig.</b>
	0,187

Sumber: Data Primer Diolah (2020)

Deviation from Linearity antara variabel religiusitas terhadap variabel intoleransi politik menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,187. Maka dari itu dapat

disimpulkan bahwa ada hubungan linear yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

**Tabel 9.** Hasil Uji Linearitas Variabel Kepercayaan Politik

<i>Deviation from Linearity</i>	<b>Sig.</b>
	0,179

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Deviation from Linearity antara variabel kepercayaan politik terhadap variabel intoleransi politik menunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,179. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear yang

signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian adalah uji heterokedastisitas dalam penelitian ini yang dipaparkan dalam tabel berikut..

**Tabel 10.** Hasil Uji Heterokedastisitas

<b>Keterangan</b>	<b>Sig.</b>
Religiusitas (X1)	0,127
Kepercayaan Politik (X2)	0,552

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan tabel uji heterokedastisitas dengan metode *Glejser Test*, masih-masing variabel memiliki nilai signifikansi yaitu religiusitas (0,127), kepercayaan politik (0,552) yang artinya keseluruhan variabel memiliki signifikansi diatas 0,05. Dengan demikian

seluruh variabel tidak terkena masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Uji hipotesis pertama adalah mengenai pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik. Berikut adalah hasilnya.

**Tabel 11.** Hasil Uji Regresi Sederhana

<b>Model</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keputusan</b>
Religiusitas	-2,490	0,015	H1a diterima

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan tabel *coefficients*, diperoleh bahwa nilai t sebesar -2,490 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar

0,015 yang berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara religiusitas terhadap intoleransi politik.

**Tabel 12.** Tabel *R Square*

<b>Model</b>	<b>R Square</b>
Religiusitas	0,070

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan tabel 12, nilai R Square sebesar 0,070 yang berarti variabel religiusitas memiliki kemampuan untuk memengaruhi variabel intoleransi politik sebesar 7 persen. Sedangkan sisanya sebesar 93 persen

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Uji hipotesis yang kedua adalah mengenai pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik dengan kepercayaan politik sebagai variabel moderator. Berikut adalah hasilnya.

**Tabel 13.** Tabel *R Square* dengan Variabel Moderator

<b>Model</b>	<b>R Square</b>	<b>Keputusan</b>
Kepercayaan Politik	0,144	H1b Diterima

*Sumber: Data Primer Diolah (2020)*

Berdasarkan tabel 13, nilai R Square sebesar 0,144 yang berarti variabel religiusitas memiliki kemampuan dalam memengaruhi

variabel intoleransi politik sebesar 14,4 persen. Sisanya sebesar 85,6 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Pada uji sebelumnya

tanpa variabel kepercayaan politik sebagai variabel moderator, religiusitas hanya memiliki kemampuan dalam memengaruhi variabel intoleransi politik sebesar 7%. Hal tersebut membuktikan bahwa variabel kepercayaan politik sebagai variabel moderator berhasil memperkuat pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik. Dengan demikian hipotesis H1b juga diterima.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel bebas yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa religiusitas pada mahasiswa Universitas Islam Malang sebagian besar berada dalam kategori sedang. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrillah & Widodo (2015) dan Maisaroh & Falah (2011). Hasil penelitian ini sangat didukung oleh penelitian Mustafa (2016), dimana pada mahasiswa yang tergolong dalam masa dewasa awal telah memiliki keinginan untuk dapat memenuhi nilai-nilai dan norma agama yang berlaku. Akan tetapi sering kali pada masa ini seorang dewasa awal belum dapat mengikuti nilai-nilai dan norma agama secara sempurna. Maka dari itu, kecenderungan religiusitas dewasa awal berada dalam kategori yang sedang.

Di sisi lain, proses keberagaman pada dewasa awal cenderung sudah didasarkan atas pemilihan secara rasional terhadap ajaran agama yang dianutnya, sehingga akan dapat memberikan kepuasan batin. Kebenaran agama yang dianut dewasa awal telah berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang sebelumnya, bukan hanya sekadar ikut-ikutan yang lainnya. Sikap religiusitas pada dewasa awal juga akan dipengaruhi oleh tipe kepribadian pada masing-masing individu dalam menerima, memahami, dan mengimplementasikan ajaran agama. Maka dari itu, tingkat religiusitasnya pun akan berbeda-beda (Jalaluddin, 2016).

Selanjutnya hasil analisis deskriptif variabel moderator yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kepercayaan politik pada mahasiswa Universitas Islam Malang berada dalam kategori sedang. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri (2018), dimana kepercayaan politik mahasiswa cenderung tidak tinggi. Akan tetapi, kepercayaannya juga cenderung tidak rendah yang menandakan bahwa mahasiswa di Universitas Islam Malang masih cukup memiliki kepercayaan terhadap kinerja dan performa lembaga politik untuk kepentingan rakyat. Saat individu masih memiliki

kepercayaan terhadap institusi politik, maka individu akan cenderung masih mendukung kebijakan yang diambil oleh institusi tersebut (Askvik & Jamil, 2013). Menurut Matulesy & Samsul (2013), seiring perkembangan teknologi daring, khususnya dalam membantu proses politik akan dapat meningkatkan kontrol mahasiswa sebagai kaum idealis sehingga dengan kemampuan kontrol yang baik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan politiknya. Maka dari itu, kepercayaan politik mahasiswa tidak juga berada dalam kategori rendah.

Di sisi lain, hasil analisis deskriptif pada variabel terikat menunjukkan bahwa intoleransi politik pada mahasiswa Universitas Islam Malang sebagian besar berada dalam kategori sedang. Kecenderungan tidak tingginya intoleransi politik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Purwono (2013), warga NU (termasuk mahasiswa) didorong dan dibiasakan untuk melakukan relasi sosial yang plural seperti melakukan toleransi kepada kelompok yang berbeda serta memandang bahwa pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. Lebih lanjut, warga NU diajarkan untuk mendahulukan kepentingan bersama, menjunjung tinggi nilai persaudaraan (*al-ukhuwah*), dan toleransi (*at-tasamuh*) (Febriana, Mustika, & Dedees, 2016). Dalam konteks politik, warga NU dianjurkan untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi (Thoyyib & Turmudzi, 2007). Nilai-nilai tersebut juga terus digaung-gaungkan di dalam lingkungan Universitas Islam Malang yang juga menjadi salah satu Perguruan Tinggi NU terbesar di Indonesia.

Akan tetapi, masih adanya beberapa mahasiswa yang memiliki kecenderungan intoleransi tinggi. Selain disebabkan karena sebaran mahasiswa Universitas Islam Malang yang berasal dari seluruh Indonesia sehingga memungkinkan karakteristik watak yang dimiliki mahasiswa lebih heterogen. Para psikolog sosial dan ilmuwan sosial (dalam Qodir, 2018) menyatakan setidaknya ada empat faktor penyebab timbulnya intoleransi pada kaum muda (mahasiswa), faktor-faktor tersebut pertama adalah kesiapan mental yang belum matang, sehingga kaum muda cenderung mudah terpersuasi oleh informasi-informasi yang disampaikan oleh figur yang dianggap lebih pintar, lebih berkuasa, dan lebih tua dalam konteks keagamaan. Faktor kedua adalah ketimpangan politik yang terjadi sehingga kaum muda berspekulasi bahwa dirinya kurang mendapatkan media yang memadai untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Faktor ketiga adalah ketimpangan

ekonomi pada kaum muda seperti sulitnya mencari pekerjaan yang nantinya menjadi bibit subur munculnya intoleransi politik dan kebencian. Faktor keempat adalah pemahaman keagamaan yang cenderung hanya tekstual sehingga kurang mampu menyesuaikan dengan kontekstual situasi yang terjadi saat ini.

Hasil uji hipotesis H1a dalam penelitian mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara religiusitas dengan intoleransi politik. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zhafira, 2017) yang mengatakan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara religiusitas dengan intoleransi politik. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saliyo (2018) dimana tidak ada hubungan antara religiusitas dengan toleransi politik.

Menurut Qodir (2018), terdapat empat faktor penyebab terjadinya intoleransi politik, khususnya pada kaum muda. Salah satu faktor tersebut adalah pemahaman teks keagamaan. Hal tersebut merupakan isu-isu lama yang selalu direproduksi kembali oleh oknum-oknum tertentu sehingga akan berpeluang untuk menimbulkan benih-benih kebencian antar sesama umat beragama. Doktrin-doktrin bahwa suatu agama adalah yang paling benar diantara agama-agama lain juga dapat menjadi pemicu intoleransi politik. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi pada organisasi islam yang berafiliasi NU yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

Purwono (2013) menyampaikan bahwa ajaran dalam NU sendiri memiliki empat prinsip utama yaitu *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang atau proporsional), *ta'adul* (keadilan), *tawasuth* (moderat), dan *tasyawur* (musyawarah). Hal tersebut memiliki implikasi pada relasi sosial yang plural sehingga mampu mengembangkan sikap toleransi pada kelompok-kelompok yang berbeda. Implikasi lainnya adalah terciptanya pergaulan antar golongan yang didasarkan atas perilaku saling menghormati dan menghargai (Thoyyib & Turmudzi, 2007). Maka dari itu, wajar apabila dalam penelitian ini religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap intoleransi politik. Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi religiusitas dari individu, maka semakin rendah juga probabilitas individu untuk melakukan intoleransi politik.

Hasil uji hipotesis H1b dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik memiliki efek moderator yang signifikan dalam meningkatkan pengaruh

religiusitas terhadap intoleransi politik. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhafira (2017) dimana kepercayaan politik tidak signifikan menjadi variabel moderator dalam hubungan antara religiusitas dengan intoleransi politik. Di sisi lain, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eisenstein, Clark, & Jelen (2017), dimana kepercayaan memiliki hubungan yang searah dengan toleransi politik. Jika dikaitkan dengan konteks dalam kegiatan politik, maka individu yang memiliki kepercayaan politik tinggi akan cenderung lebih toleran terhadap kelompok lain.

Hasil penelitian ini semakin menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh (Newton, 2001) bahwa kepercayaan politik yang merupakan sebutan lain dari kepercayaan terhadap pemerintah maupun institusi politik dapat memengaruhi toleransi politik dari seorang individu. Kepercayaan politik dianggap penting sebab dapat digunakan sebagai indikator dalam memastikan bahwa elemen-elemen politik yang ada memiliki kapabilitas yang baik. Selain itu, penelitian dari (Welch, Sikkink, Sartain, & Bond, 2004) menyatakan bahwa agama memiliki korelasi dengan kecenderungan kepercayaan individu dalam berbagai aspek. Apalagi di negara yang memiliki pluralisme tinggi seperti di Indonesia, agama merupakan hal yang dapat memengaruhi perilaku politik termasuk kepercayaan dan toleransi politik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas individu yang tinggi dengan diiringi kepercayaan politik yang baik akan semakin meminimalisasi kecenderungan untuk melakukan intoleransi politik.

## PENUTUP

Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa H1a diterima, yakni terdapat pengaruh secara negatif dan signifikan religiusitas terhadap intoleransi politik. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas individu, maka semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan intoleransi politik.

Hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa H1b diterima, yakni kepercayaan politik signifikan sebagai variabel moderator untuk memperkuat pengaruh religiusitas terhadap intoleransi politik. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kepercayaan politik akan meningkatkan kemampuan religiusitas dalam mempengaruhi intoleransi dari individu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrilah, T. K., & Widodo, P. B. (2015). Religiusitas dan Pemaafan dalam Konflik Organisasi pada Aktivist Islam di Kampus Universitas Diponegoro. *Jurnal Empati*, 4(4), 287–292.
- Askvik, S., & Jamil, I. (2013). The Institutional Trust Paradox in Bangladesh. *Public Organization Review*, 13(4), 459–476. <https://doi.org/10.1007/s11115-013-0263-6>
- Detik News. (2018). *Survei: Potensi Intoleransi Muslim RI Meningkat, Projihad Keras 13%*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3839963/survei-potensi-intoleransi-muslim-ri-meningkat-projihad-keras-13-pada-20-Februari-2020>.
- Eisenstein, M. A., & Clark, A. K. (2014). Political Tolerance, Psychological Security, and Religion: Disaggregating the Mediating Influence of Psychological Security. *Politics and Religion*, 7(2), 287–317. <https://doi.org/10.1017/S1755048314000054>
- Eisenstein, M. A., Clark, A. K., & Jelen, T. G. (2017). Political Tolerance and Religion: An Age-Period-Cohort Analysis, 1984–2014. *Review of Religious Research*, 55(3). <https://doi.org/10.1007/s13644-017-0295-4>
- EI-Menouar, Y. (2014). The Five Dimensions of Muslim Religiosity. *Method, Data, Analyses*, 8(1), 53–78. <https://doi.org/10.12758/mda.2014.003>
- Febrina, R. H., Mustika, B. U., & Dedeas, A. R. (2016). Nahdlatul Ulama: Bebas untuk Oportunis? Menelisik Kontestasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Periode 2008 dan 2013. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 99–113. <https://doi.org/10.22146/jsp.13131>
- Gibson, J. L. (2010). The Political Consequences of Religiosity Does Religion Always cause Political Intolerance? In *Religion and Democracy in the United States: Danger or Opportunity?* <https://doi.org/10.1515/9781400836772.147>
- Gibson, J. L., & Bingham, R. D. (1982). On the Conceptualization and Measurement of Political Tolerance. *American Political Science Review*, 76(3), 603–620. <https://doi.org/10.1017/S0003055400188434>
- Grimmelikhuijsen, S., & Knies, E. (2017). Validating a Scale for Citizen Trust in Government Organizations. *International Review of Administrative Science*, 83(3), 583–601. <https://doi.org/10.1177/0020852315585950>
- Hardin, R. (2003). Trust in Government. In *Trust and Governance* (pp. 9–27). <https://doi.org/10.1093/cdj/37.1.118>
- CNN Indonesia. (2019). *Bawaslu Sebut Ada 7.132 Pelanggaran Selama Pemilu 2019*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019-pada-20-Februari-2020>.
- Jalaluddin. (2016). *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maisaroh, E. N., & Falah, F. (2011). Religiusitas dan Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional (UN). *Jurnal Psikologi Proyeksi*, 6(2), 78–88.
- Matulessy, A., & Samsul. (2013). Political Efficacy, Political Trust dan Collective Self Esteem dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 4(1), 84–106.
- Morris, R. E., & Stouffer, S. A. (1955). *Communism, Conformity, and Civil Liberties : A Cross- Section of the Nation Speaks Its Mind*. <https://doi.org/10.2307/3709488>
- Mustafa. (2016). Perkembangan Jiwa Beragama pada Masa Dewasa. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.22373/je.v2i1.692>

- Newton, K. (2001). Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy. *International Political Science Review*, 22(2), 201–214.  
<https://doi.org/10.1177/0192512101222004>
- Nurfitri, A. D. (2018). *Hubungan antara Efikasi Politik dan Kepercayaan Politik dengan Partisipasi Politik Daring pada Mahasiswa Pengguna Media Sosial di Kota Semarang*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Purwono, A. (2013). Organisasi Keagamaan dan Keamanan Internasional: Beberapa Prinsip dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 2(2).  
<https://doi.org/10.24252/JPP.V1I2.951>
- Qodir, Z. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429–445.  
<https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Ramadhan, F. S., & Masykuri, R. (2018). Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 249–265.  
<https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Robbins, R., Glock, C. Y., & Stark, R. (1966). Religion and Society in Tension. *Sociological Analysis*, 27(3), 173–175.  
<https://doi.org/10.2307/3710391>
- Saliyo. (2018). Pengaruh Religiusitas Jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen Terhadap Perilaku Toleransi Beragama dengan Kepribadian yang Dimilikinya. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 65–84.  
<https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.65-84>
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sullivan, J. L., Marcus, G. E., Feldman, S., & Piereson, J. E. (1981). The Sources of Political Tolerance: A Multivariate Analysis. *American Political Science Review*, 75(1), 92–106.  
<https://doi.org/10.2307/1962161>
- Sullivan, J. L., Piereson, J., & Marcus, G. E. (1979). An Alternative Conceptualization of Political Tolerance: Illusory Increases 1950s–1970s. *American Political Science Review*, 73(3), 781–794.  
<https://doi.org/10.2307/1955404>
- Tempo.com. (2019). *Indonesia Negara Demokrasi Terbesar Ketiga Dunia*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/369489/indonesia-negara-demokrasi-terbesar-ketiga-dunia>. pada 20 Februari 2020.
- Thoyyib, & Turmuzi, E. (2007). *Islam Ahlussunnah Waljamaah: Sejarah, Pemikiran dan Dinamika Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Ma'arif NU.
- Welch, M. R., Sikkink, D., Sartain, E., & Bond, C. (2004). Trust in God and Trust in Man: The Ambivalent Role of Religion in Shaping Dimensions of Social Trust. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 43(3), 317–343.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00238.x>
- Zhafira, A. (2017). Efek Moderasi Kepercayaan Politik terhadap Hubungan antara Religiusitas Islam dan Intoleransi Politik. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 122–135.  
<https://doi.org/10.7454/jps.2017.11>